

Judul : Defisit Anggaran, Ditargetkan 2,19%
Tanggal : Selasa, 26 September 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 18

Defisit Anggaran Ditargetkan 2,19%

JAKARTA – Pemerintah menargetkan defisit anggaran untuk RAPBN 2018 sebesar 2,19% atau Rp325,9 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan defisit tersebut dinilai aman agar kondisi APBN tetap sehat dan produktif.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, defisit anggaran dalam RAPBN 2018 dirancang bersifat ekspansif sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan produktif.

“Dengan demikian, APBN bisa mendukung kegiatan produktif untuk meningkatkan kapasitas, produksi, dan daya saing,” ujar dia di Badan Anggaran DPR, Jakarta, kemarin.

Suahasil melanjutkan, pemerintah selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan utang. Pada postur pembiayaan utang dalam RAPBN 2018, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (neto) sebesar Rp414,7 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp15,5 triliun. “Pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan

utang dengan melihat kurs dalam RAPBN 2018,” ungkap dia.

Menurut Suahasil, porsi pembiayaan secara keseluruhan sudah mempertimbangkan perubahan asumsi kurs dalam RAPBN 2018 dari Rp13.500 menjadi Rp13.400 per dolar AS. “Kami melakukan sedikit perbaikan sesuai dengan kurs yang baru karena untuk iuran internasional kita menggunakan mata uang asing sesuai dengan asumsi terakhir Rp13.400,” ungkap dia.

Selain itu, porsi pembiayaan utang ini juga akan digunakan untuk pembiayaan pinjaman kepada BUMN dan pemda Rp6,7 triliun serta kewajiban pinjaman Rp1,1 triliun. Sementara pembiayaan investasi Rp65,7 triliun akan dimanfaatkan untuk investasi BUMN Rp3,6 triliun, investasi BLU Rp57,4 triliun, investasi

lembaga lain Rp2,5 triliun, dan investasi organisasi/LKI/BUI Rp2,1 triliun.

Pembiayaan investasi tersebut antara lain digunakan untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp35,4 triliun guna pembebasan lahan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah Rp2,5 triliun guna mendorong pembiayaan UMKM yang kreatif dan inovatif.

Suahasil menuturkan, guna meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan BLU Perumahan PPDPP Rp2,2 triliun. Kemudian, PMN kepada Tapera Rp2,5 triliun untuk pembentukan BP Tapera dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp15 triliun untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat.

Adapun pembiayaan investasi ini dimanfaatkan untuk PMN bagi PT KAI Rp3,6 triliun guna pembangunan infrastruktur, dan bantuan internasional Rp1 triliun, BLU Perikanan LPMUKP Rp0,9 triliun untuk penguatan modal usaha kelautan dan perikanan, serta BLU Kehutanan P2H Rp0,5 triliun untuk pembiayaan kepada UMKM

industri ramah lingkungan.

Suahasil menambahkan, pemerintah akan menyiapkan dana bantuan internasional Rp1 triliun pada 2018 untuk digunakan sebagai alat politik internasional. Bantuan internasional disesuaikan dengan kondisi politik luar negeri dan akan terkonsolidasi dari masing-masing kementerian atau lembaga.

“Indonesia sudah banyak memberikan bantuan ke luar negeri dan bantuan itu bukan hanya berbentuk uang, tapi juga yang sifatnya teknis. Ada juga bantuan yang sifatnya terprogram, ke World Bank, ADB. Nah, kita negara donor, kita salurkan ke lembaga itu supaya disalurkan ke masing-masing negara,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin selaku pemimpin Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dalam RAPBN 2018 sebesar Rp325,9 triliun yang diajukan pemerintah. “Terkait postur pembiayaan 2018, maka bisa kami sepakati postur pembiayaan ini,” ujar dia.

● **oktiani endarwati**